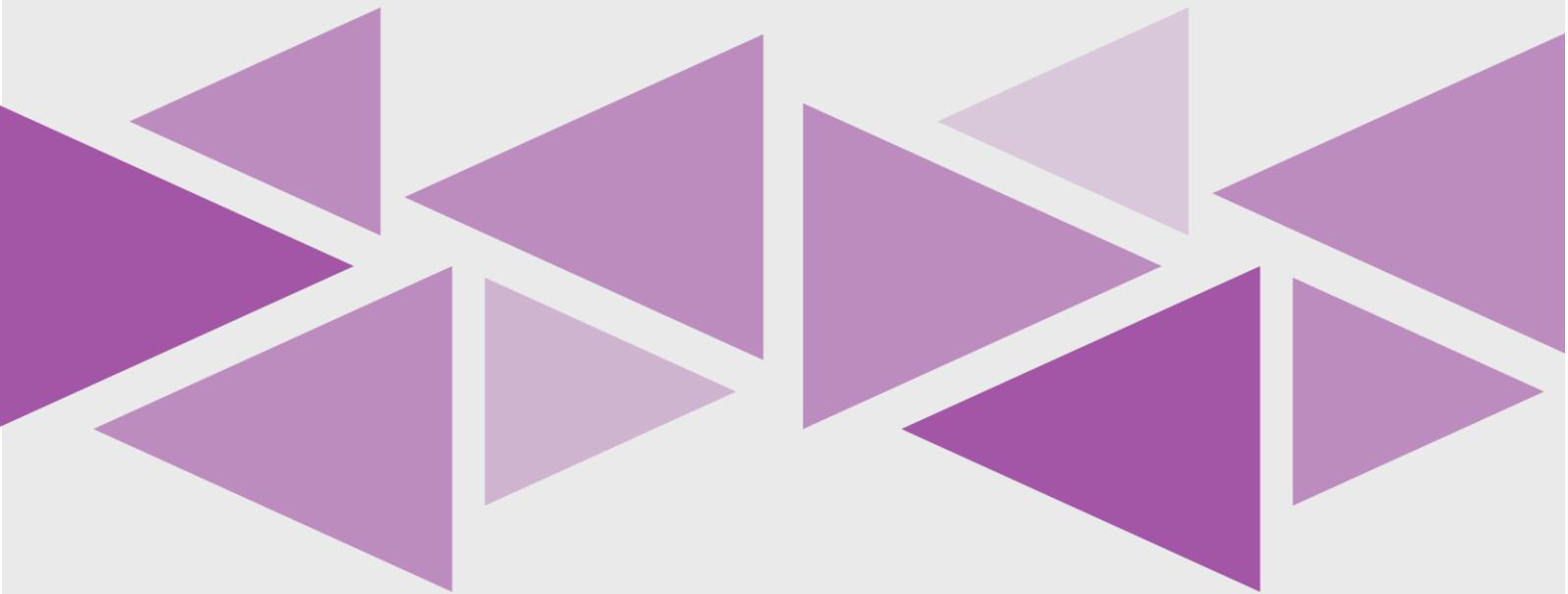




# 2024

## Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I

---



**DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PURWAKARTA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu organisasi pemerintah yang dituntut dari tahun ketahun untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan sebuah organisasi dipengaruhi oleh ketepatan, kualitas dan transparansi penyampaian pelaporan kinerja. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai ungkapan komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan pelaksanaan

program dan kegiatan.

Akhir kata, semoga Laporan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja.

Purwakarta, April 2024

**Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PURWAKARTA**



**DANI ABDURAHMAN, SH, MH**

Pembina Utama Muda

NIP.19710713 199901 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Tujuan dan Keluaran.....	3
1.4. Ruang Lingkup.....	4
<b>BAB II EVALUASI KINERJA</b>	
2.1. Perjanjian Kinerja.....	6
2.2. Capaian Kinerja.....	6
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>41</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta memiliki kewajiban dan komitmen untuk menyampaikan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan yang pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, yang diwujudkan dalam Laporan Monev Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2024 Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang

bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Laporan kinerja merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan ini dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum perlunya menyusun Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan adalah berlandaskan pada:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

### **1.3. Tujuan dan Keluaran**

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan

monitoring, evaluasi serta membuat pelaporan secara vertikal maupun horisontal terhadap kegiatan-kegiatan yang akan, sedang, maupun telah dilaksanakan melalui kinerja yang profesional untuk menghasilkan keluaran sesuai target yang diharapkan. Disamping itu juga memantau kinerja dan hasil kegiatan di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yang terukur melalui pelaporan monitoring dan evaluasi dengan lancar dan sistematis (bulanan, triwulan, semester, tahunan), sehingga diperoleh pelaporan monitoring dan evaluasi yang baik dan sistematis. Sasaran lain yang ingin dicapai adalah terpantaunya kinerja dan hasil kegiatan di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

Keluaran (output) yang diharapkan dari penyelenggaraan monev adalah :

1. Monitoring dan Evaluasi
2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan Tahun Anggaran 2024.
3. Laporan berkala pelaksanaan kegiatan baik Bulanan, Semester serta tahun.

#### **1.4. Ruang Lingkup**

Pelaksanaan rapat monev Triwulan I dalam bentuk pertemuan koordinasi internal dan penyampaian laporan triwulan

oleh penanggung jawab kegiatan. Melibatkan anggota tim peneliti, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, pelaksana monev, untuk periode triwulan I tahun anggaran 2024 ini pelaporan monev dilaksanakan secara internal oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sendiri dan tidak melibatkan evaluator dari eksternal Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

## **BAB II**

### **EVALUASI KINERJA**

#### **2.1. Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kepala Dinas dengan Bupati Purwakarta memuat 7 sasaran kinerja utama dengan 8 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

#### **2.2. Capaian Kinerja**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja Program, yang dihasilkan pada tahun 2024 sampai dengan triwulan I :

Tabel 2.1  
Capaian Kinerja Program

Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan I	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	9	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	A		0	<b>0</b>	SANGAT RENDAH
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM							
	Persentase ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang diterbitkan	%	87,5	2,86	2,86	<b>3,2685714</b>	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							
	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan	%	89,7	24,95	24,95	<b>27,814939</b>	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							
	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	89,7	15,45	15	<b>17,22408</b>	SANGAT RENDAH

	Persentase Koperasi yang mendapatkan penghargaan hasil penilaian	%	12	0,00	0	<b>0</b>	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							
	Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian	%	72,82	0	0	<b>0</b>	SANGAT RENDAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	85,23	0	0	<b>0</b>	SANGAT RENDAH
	Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha	%	56,46	0	0	<b>0</b>	SANGAT RENDAH
	Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha	%	75,23	0	0	<b>0</b>	SANGAT RENDAH
	Tingkat Wirausaha Baru (WUB)	%	2,53	0	0	<b>0</b>	SANGAT RENDAH
	Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan/sosialisasi kewirausahaan	%	57,9	0	0	<b>0</b>	SANGAT RENDAH

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	20,56	0	0	<b>0</b>	SANGAT RENDAH
	Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya	%	9,63	0	0	<b>0</b>	SANGAT RENDAH
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	95,32	20,52	21	<b>21,527486</b>	SANGAT RENDAH
	Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan	%	100	23,33	23	<b>23,33</b>	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							
	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia	%	100	0	0	<b>0</b>	SANGAT RENDAH

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							
	Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya	%	100	78,57	79	78,57	TINGGI
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	37	21,50	22	<b>58,108108</b>	RENDAH
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							
	Tingkat Nilai Export bersih	%	1	0	0	<b>0</b>	SANGAT RENDAH
	Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	%	2	0	0	<b>0</b>	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							
	Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	%	50	0	0	<b>0</b>	SANGAT RENDAH
	Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	%	50	0	0	<b>0</b>	SANGAT RENDAH

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							
	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	64,62	6,85	7	<b>10,600433</b>	SANGAT RENDAH
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	60	20	20	<b>33,333333</b>	SANGAT RENDAH
	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	83,33	34,29	34	<b>41,149646</b>	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA							
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	20,71	1,55	2	<b>7,4843071</b>	SANGAT RENDAH

	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	66,67	67	<b>66,67</b>	SEDANG
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	0,00	0	<b>0</b>	SANGAT RENDAH
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	100	25,00	25	<b>25</b>	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
	Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri yang dilaksanakan	Kegiatan	10	0	0	<b>0</b>	SANGAT RENDAH

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang dihasilkan pada tahun 2024 sampai dengan triwulan I :

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Kegiatan dsn Sub Kegiatan

Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan I	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							
	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>71,42857143</b>	<b>SEDANG</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	2	2	<b>50</b>	SANGAT RENDAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	<b>0</b>	SANGAT RENDAH
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	100	SANGAT TINGGI

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	SANGAT RENDAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	1	1	25	SANGAT RENDAH
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							
	<b>Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>66,66666667</b>	<b>SEDANG</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	3	3	25	SANGAT RENDAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	100	SANGAT TINGGI

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	1	1	<b>25</b>	SANGAT RENDAH
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>							
	<b>Jumlah dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>							
	<b>Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah							
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	0	0	<b>0</b>	SANGAT RENDAH

Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah							
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	0	0	0	SANGAT RENDAH
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							
	<b>Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	0	SANGAT RENDAH
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	0	0	0	SANGAT RENDAH
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	0	0	0	SANGAT RENDAH
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							
	<b>Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	SANGAT RENDAH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	SANGAT RENDAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	SANGAT RENDAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan							
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	SANGAT RENDAH
Fasilitasi Kunjungan Tamu							
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	SANGAT RENDAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	0	0	0	SANGAT RENDAH

<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							
	<b>Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>
Pengadaan Mebel							
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	SANGAT RENDAH
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	SANGAT RENDAH
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
	<b>Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	SANGAT RENDAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	53	13	13	<b>24,52830189</b>	SANGAT RENDAH

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
	<b>Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>75</b>	<b>SEDANG</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	7	0	0	0	SANGAT RENDAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	0	0	0	SANGAT RENDAH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	0	0	0	SANGAT RENDAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1	1	33,33333333	SANGAT RENDAH

<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							
	<b>Jumlah ijin usaha koperasi simpan pinjam kewenangan kabupaten yang diterbitkan</b>	<b>Unit Usaha</b>	<b>35</b>	1	<b>1</b>	<b>2,857142857</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	35	1	<b>1</b>	<b>2,857142857</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>
<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>							
	<b>Jumlah koperasi yang diperiksa dan di awasi</b>	<b>Unit Usaha</b>	<b>505</b>	126	<b>126</b>	<b>24,95049505</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi							
	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	505	126	126	<b>24,95049505</b>	SANGAT RENDAH

<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							
	<b>Jumlah koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang di nilai kesehatannya</b>	<b>Unit Usaha</b>	<b>505</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>15,44554455</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan							
	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	12	0	0	0	SANGAT RENDAH
<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							
	<b>Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>	<b>Unit Usaha</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi							
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	150	0	0	0	SANGAT RENDAH
<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>							
	<b>Jumlah fasilitasi UKM dalam pemberdayaan</b>	<b>Unit Usaha</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>

Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro							
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	50	0	0	0	SANGAT RENDAH
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro							
	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	700	0	0	0	SANGAT RENDAH
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro							
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	25	0	0	0	SANGAT RENDAH
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro							
	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	25	0	0	0	SANGAT RENDAH
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan							
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	150	0	0	0	SANGAT RENDAH

<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>							
	<b>Jumlah Usaha Mikro dengan peningkatan menjadi usaha kecil</b>	<b>Unit Usaha</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi							
	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	240	0	0	0	SANGAT RENDAH
<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>							
	<b>Jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	2	0	0	0	SANGAT RENDAH

<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>							
	<b>Jumlah Penerbitan TDG</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang							
	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	1	0	0	0	SANGAT RENDAH
<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri</b>							
	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Dokumen	1	0	0	0	SANGAT RENDAH
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik							
	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	0	0	0	SANGAT RENDAH
<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri</b>							
	<b>Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>

Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri							
	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Dokumen	1	0	0	0	SANGAT RENDAH
<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)</b>							
	Jumlah Penerbitan SKA	Dokumen	1	0	0	0	SANGAT RENDAH
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA							
	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	16444	2.356	2.356	14,32741425	SANGAT RENDAH
<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>							
	<b>Jumlah Pengelola yang di bina</b>	<b>Orang</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan							
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1	0	0	0	SANGAT RENDAH

<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>							
	<b>Jumlah Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting</b>	<b>Komoditi</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>78,57142857</b>	<b>TINGGI</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat							
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat							
	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>							
	<b>Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia dan harga</b>	<b>Komoditi</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>78,57142857</b>	<b>TINGGI</b>

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota							
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting padaPelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota							
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							
	<b>Jumlah dokumen pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi							
	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsididengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	1	0	0	0	SANGAT RENDAH

<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							
	<b>Jumlah kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>
Pameran Dagang Nasional							
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	20	0	0	0	SANGAT RENDAH
Peningkatan Citra Produk Ekspor							
	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	50	0	0	0	SANGAT RENDAH
<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>							
	<b>Jumlah Jenis produk UMKM yang di Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaandi Kabupaten</b>	<b>Produk</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri diTingkat Kabupaten/Kota							
	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeridi Tingkat Kabupaten/Kota	Produk	10	0	0	0	SANGAT RENDAH

Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota							
	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	10	0	0	0	SANGAT RENDAH
<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>							
	<b>Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan</b>	Unit	21000	1.438	1.438	6,847619048	<b>SANGAT RENDAH</b>
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang							
	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	21000	1438	1.438	6,847619048	SANGAT RENDAH
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal							
	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	200	169	169	84,5	TINGGI
<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>							
	<b>Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>

Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri							
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	0	0	0	SANGAT RENDAH
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri							
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	0	0	0	SANGAT RENDAH
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	0	0	0	SANGAT RENDAH
<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>							
	<b>Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Dokumen	1	0	0	0	<b>SANGAT RENDAH</b>

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota							
	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	0	0	0	SANGAT RENDAH
<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>							
	<b>Jumlah dokumen informasi Industri untuk Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Dokumen	1	0	0	0	<b>SANGAT RENDAH</b>
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas							
	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	1	0	0	0	SANGAT RENDAH

Untuk mengetahui penyerapan anggaran Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Triwulan I Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada table 3.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

## Realisasi Anggaran Triwulan I 2024

Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	APBD Tahun Anggaran 2024	Realisasi Triwulan I Tahun 2024	Realisasi Capaian Anggaran	Sisa Anggaran	Tingkat Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.010.452.572</b>	<b>4.121.023.954</b>	<b>4.121.023.954</b>	<b>10.889.428.618</b>	<b>27,45%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>179.322.100</b>	<b>6.334.000</b>	<b>6.334.000</b>	<b>172.988.100</b>	<b>3,53%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.277.300	4.204.000	4.204.000	73.073.300	5,44%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.311.700	0	0	5.311.700	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.069.100	0	0	5.069.100	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.198.100	2.130.000	2.130.000	3.068.100	40,98%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.007.900	0	0	5.007.900	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.561.000	0	0	52.561.000	0,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.897.000	0	0	28.897.000	0,00%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.333.325.676</b>	<b>2.864.401.699</b>	<b>2.864.401.699</b>	<b>10.333.325.676</b>	<b>27,72%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.313.325.676	2.862.981.699	2.862.981.699	7.450.343.977	27,76%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	1.420.000	1.420.000	8.580.000	14,20%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	0	0	10.000.000	0,00%
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>19.490.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.490.300</b>	<b>0,00%</b>

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.956.700	0	0	9.956.700	0,00%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.533.600	0	0	9.533.600	0,00%
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>44.028.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.028.000</b>	0,00%
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	39.028.000	0	0	39.028.000	0,00%
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000	0	0	5.000.000	0,00%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>165.999.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.999.200</b>	<b>0,00%</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.999.600	0	0	9.999.600	0,00%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19.999.600	0	0	19.999.600	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	136.000.000	0	0	136.000.000	0,00%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.209.976.000</b>	<b>503.474.000</b>	<b>503.474.000</b>	<b>706.502.000</b>	<b>41,61%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.999.000	0	0	49.999.000	0,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.804.000	0	0	170.804.000	0,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.993.000	0	0	49.993.000	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	700.000.000	451.274.000	451.274.000	248.726.000	64,47%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.290.000	0	0	105.290.000	0,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	0	0	20.000.000	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	52.200.000	52.200.000	47.800.000	52,20%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.890.000	0	0	13.890.000	0,00%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>236.832.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.832.000</b>	0,00%
Pengadaan Mebel	103.192.000	0	0	103.192.000	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	133.640.000	0	0	133.640.000	0,00%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.790.663.696</b>	<b>547.739.655</b>	<b>547.739.655</b>	1.242.924.041	30,59%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	0	0	5.000.000	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.984.528	50.220.705	50.220.705	199.763.823	20,09%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.535.679.168	497.518.950	497.518.950	1.038.160.218	32,40%

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.030.815.600</b>	<b>199.074.600</b>	<b>199.074.600</b>	<b>831.741.000</b>	<b>19,31%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	0	0	80.000.000	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.350.000	0	0	56.350.000	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.550.000	0	0	24.550.000	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	869.915.600	199.074.600	199.074.600	670.841.000	22,88%
<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0,00%</b>
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	0	0	50.000.000	0,00%
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>125.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>125.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000.000</b>	<b>0,00%</b>
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	125.000.000	0	0	125.000.000	0,00%
<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0,00%</b>
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	200.000.000	0	0	200.000.000	0,00%
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>189.707.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.707.600</b>	<b>0,00%</b>
<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>189.707.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.707.600</b>	<b>0,00%</b>
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	189.707.600		0	189.707.600	0,00%

<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>1.060.882.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.060.882.816</b>	<b>0,00%</b>
<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>1.060.882.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.060.882.816</b>	<b>0,00%</b>
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	68.036.000	0	0	68.036.000	0,00%
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	270.270.400	0		270.270.400	0,00%
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	599.992.300	0		599.992.300	0,00%
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	50.302.616	0		50.302.616	0,00%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	72.281.500	0	0	72.281.500	0,00%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>488.157.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488.157.690</b>	<b>0,00%</b>
<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>488.157.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488.157.690</b>	<b>0,00%</b>
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	488.157.690	0	0	488.157.690	0,00%
<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>129.437.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.437.400</b>	<b>0,00%</b>
<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	<b>64.439.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.439.400</b>	<b>0,00%</b>
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	64.439.400	0	0	64.439.400	0,00%
<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0,00%</b>
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15.000.000	0	0	15.000.000	0,00%
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0,00%</b>
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	15.000.000				
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	<b>14.998.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.998.000</b>	<b>0,00%</b>

Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	14.998.000	0	0	14.998.000	0,00%
Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0,00%</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	20.000.000	0	0	20.000.000	0,00%
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0,00%</b>
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	20.000.000	0	0	20.000.000	0,00%
<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>259.545.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.545.400</b>	<b>0,00%</b>
<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>29.999.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.999.200</b>	<b>0,00%</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	14.999.600	0	0	14.999.600	0,00%
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	14.999.600	0	0	14.999.600	0,00%
<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>214.547.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.547.600</b>	<b>0,00%</b>
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	14.549.600	0	0	14.549.600	0,00%
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	199.998.000	0	0	199.998.000	0,00%
<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14.998.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.998.600</b>	<b>0,00%</b>
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	14.998.600	0	0	14.998.600	0,00%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>178.790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.790.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>178.790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.790.000</b>	<b>0,00%</b>

Pameran Dagang Nasional	78.890.000	0	0	78.890.000	0,00%
Peningkatan Citra Produk Ekspor	99.900.000	0	0	99.900.000	0,00%
<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0,00%</b>
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000	0	0	50.000.000	0,00%
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40.000.000	0		40.000.000	0,00%
<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>275.000.000</b>	<b>19.480.000</b>	<b>19.480.000</b>	<b>255.520.000</b>	<b>7,08%</b>
<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>275.000.000</b>	<b>19.480.000</b>	<b>19.480.000</b>	<b>255.520.000</b>	<b>7,08%</b>
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	200.000.000	17.266.000	17.266.000	182.734.000	8,63%
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	75.000.000	2.214.000	2.214.000	72.786.000	2,95%
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>849.953.000</b>	<b>82.400.000</b>	<b>82.400.000</b>	<b>767.553.000</b>	<b>9,69%</b>
<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>849.953.000</b>	<b>82.400.000</b>	<b>82.400.000</b>	<b>767.553.000</b>	<b>9,69%</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	150.000.000	0	0	150.000.000	0,00%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	149.971.000	0	0	149.971.000	0,00%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	549.982.000	82.400.000	82.400.000	467.582.000	14,98%
<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>49.974.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.974.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>49.974.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.974.000</b>	<b>0,00%</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	49.974.000	0	0	49.974.000	0,00%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>149.986.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.986.000</b>	<b>0,00%</b>

<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>149.986.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.986.000</b>	<b>0,00%</b>
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	149.986.000	0	0		0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>19.126.886.478</b>	<b>4.222.903.954</b>	<b>4.222.903.954</b>	<b>14.903.982.524</b>	<b>22,08%</b>

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Triwulan I Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024s ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pada Triwulan I.